

**RENCANA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**(BAPPEDALITBANG)**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Diponegoro No.060, Telp. (0536) 3221715-3221645,Fax.(0536) 3221715, 3229160, Palangka Raya, 73111



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/ 273 /2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;

- oo. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juli 2021



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:  
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;  
c. Asisten Administrasi Umum; dan  
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga perencana pembangunan di daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas unit kerja perencanaan pembangunan di daerah, dan merupakan aktualisasi dari fungsi manajemen, sekaligus juga sebagai landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Bappedalitbang serta pengendalian pembangunan (berupa monitoring dan evaluasi) sebagai umpan balik (*feed back*) perencanaan berikutnya.



Rencana Kerja Bappedalitbang tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Unit Kerja di lingkup Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, diharapkan mampu untuk menjembatani dan memaduserasikan antara berbagai sumberdaya yang ada guna kemajuan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Disadari bahwa Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini masih belum dapat menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depan akan diupayakan secara lebih akomodatif. Oleh karena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, 28 Juli 2021

**KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**



**Ir. YUREN S. BAHAT, MM.,MT**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630510 199003 1 014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-2
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	II-1
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang .....	II-12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	
Bappedalitbang.....	II-12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat .....	II-17
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran .....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan Bappedalitbang .....	III-8
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	IV
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	V
<b>LAMPIRAN</b> Kesepakatan Penetapan Indikator Perangkat Daerah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diwajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam Perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat Daerah untuk Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu Penyusunan rancangan

keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD). Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan oleh Kepala Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perangkat daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
15. Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan menyusun pagu indikatif serta prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Bab V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap Renja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi kinerja tahun 2020 merupakan tahapan dalam penyusunan rencana kerja Bappedalitbang dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Bappedalitbang tahun 2020. Tujuan evaluasi kinerja Renja Bappedalitbang tahun 2020 antara lain untuk menilai/dan mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada Renja Bappedalitbang sebagai bagian penyusunan RKPD tahun berikutnya. Hasil evaluasi kinerja tahun 2020 selain mereview RPJMD dan RKPD serta Renja Bappedalitbang, juga memperhatikan dokumen renja Bappedalitbang tahun 2020.

Dimana pada tahun 2020 ini jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 15 program dan 80 kegiatan, masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp. 7.950.000)

Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikan surat yang terkirim baik ke pusat, daerah maupun Perangkat daerah Provinsi ditargetkan sebanyak 500 surat, terealisasi Rp. 7.950.000 (100%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik (Rp. 812.916.451,25)

Kegiatan ini direalisasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun untuk pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM dan internet, terealisasi Rp. 535.583.211 (65,89%)

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Rp. 7.500.000)

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran premi asuransi bangunan kantor



telah terealisasi sebesar Rp 6.626.000 (88,35%)

- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional (Rp. 181.080.000)  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran jasa KIR dan STNK kendaraan dinas roda 4 (empat) unit roda 4 (empat), 1 (satu) unit roda 3 (tiga) dan 3 (tiga) unit roda 2 (dua) dan terealisasi Rp. 175.071.769 (96,68%)
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Rp. 321.077.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) selama 1 (satu) tahun, terealisasi sebesar Rp. 302.795.475 (94,31%)
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rp. 146.700.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk pembelian alat-alat kebersihan kantor, terealisasi sebesar Rp. 140.268.000 (95,62%)
- g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Rp. 172.800.000,-)  
Dilaksanakan untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor berupa AC, Laptop, Printer dan Genset dan terealisasi Rp. 171.570.000 atau (99,29%)
- h. Penyediaan Alat Tulis Kantor (Rp. 107.300.000,-)  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun dan terealisasi Rp. 103.008.000 (96,00%)
- i. Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan (Rp. 95.000.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk cetak amplop, cetak buku barang, cetak map Bappedalitbang dll, terealisasi Rp. 80.043.550 (84,26%)
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Rp. 90.000.000)  
Kegiatan ini untuk pembelian alat-alat listrik untuk keperluan kantor seperti rol lampu hias, lampu sorot, lampu neon dll, dan hingga terealisasi Rp. 89.800.000 (99,78%)
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 173.000.000)  
Kegiatan ini masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran, terealisasi Rp. 173,000.000 (100%)
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Rp. 35.000.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk pembayaran majalah Kalteng Pos, Palangka Pos dan Kalimantan Pos, terealisasi Rp. 26.040.000 (74,40%)
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman (Rp. 121.084.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk penyediaan makan dan minuman rapat yang dilaksanakan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah serta perayaan hari

besar, terealisasi Rp. 88.089.500 (72,75%)

- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 369.725.394)  
Kegiatan dilaksanakan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka menghadiri undangan serta koordinasi dan konsultasi ke pusat, terealisasi Rp. 368.764.340 (99,74%)
- o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Rp. 358.300.000)  
Rapat dilaksanakan untuk perjalanan ke dalam daerah (kab/kota), terealisasi Rp. 357.861.695 (99,88%)
- p. Pembinaan Non PNS (Rp. 2.088.100.000)  
Kegiatan untuk pembayaran Gaji Tenaga Kontrak selama 1 (satu) tahun, terealisasi Rp. 2.083.817.641 atau 99,79%.
- q. Biaya Pembayaran Instruktur Senam (Rp. 30.000.000)  
Kegiatan untuk pembayaran instruktur senam selama 1 (satu) tahun dan makan dan minum kegiatan senam pagi, terealisasi Rp. 3.000.000 (10,00%)

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Meubelair (Rp. 0)  
kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Kalimantan Tengah.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Rp. 102.594.000)  
Kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor Bappedalitbang, terealisasi Rp. 102.570.000 (99,98%)

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal (Rp. 1.175.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk pegawai Bappedalitbang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terealisasi sebesar Rp. 1.175.000 (100%)

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Rp. 32.069.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun laporan capaian kinerja Bappedalitbang, terealisasi sebesar Rp. 30.819.550 (96,10%)
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran (Rp.19.745.600)  
Kegiatan dilaksanakan untuk penyusunan pelaporan keuangan semesteran yang dibuat 2 (dua) kali yaitu laporan keuangan semester 1 dan laporan keuangan

semester 2, terealisasi Rp. 19.742.450 (99,98%)

- c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran (Rp. 8.592.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk membuat laporan prognosis Bappedalitbang tahun 2020, terealisasi Rp. 8.592.000 (100%)
- d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ( Rp. 27.625.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun Bappedalitbang tahun 2019, terealisasi Rp. 26.621.625 (96,37%)

**5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah**

- a. Pengelolaan inventaris barang daerah (Rp. 92.110.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk pengelolaan inventarisasi barang milik daerah, terealisasi Rp. 87.860.000 (95,39%)

**6. Program Pengembangan Data/Informasi**

- a. Pengelolaan Data Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Rp. 3.047.250)  
Kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), terealisasi Rp. 2.433.000 (79,84%)
- b. Pengumpulan Pengolahan dan analisa data/informasi dan geospasial (Rp. 8.106.100)  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pengolahan dan analisa data/informasi dan geospasial dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terealisasi Rp 6.706.100 (82,73%)
- c. Pengembangan *e-planning* (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) (Rp. 343.092.446)  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan terealisasi Rp. 342.411.296 (99,80%)
- d. Pengembangan *e-monev* (Sistem Informasi Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) (Rp. 39.250.625)  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan dan terealisasi Rp. 32.580.000 (83,01%)
- e. Penyediaan dan Pengelolaan Data Geospasial Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 201.411.693)  
Kegiatan ini untuk pembuatan data web, *database* spasial Kalteng untuk mendukung perencanaan Pembangunan daerah dan terealisasi Rp. 183.274.118 (90,99%)

- f. Pengumpulan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan (Rp. 0)  
kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Kalimantan Tengah.
- g. Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Website Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 39.285.600)  
Kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan data, informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan yang diikuti oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah serta pengembangan website Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sarana informasi bagi masyarakat, terealisasi Rp. 30.279.600 (77,08%)

#### **7. Program Kerjasama Pembangunan**

- a. Kerjasama Pembangunan Dalam dan Luar Negeri (Rp. 29.768.064)  
Kegiatan dilaksanakan untuk efektifitasnya kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri, terealisasi Rp. 28.922.464 (97,16%)

#### **8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan regional kalimantan dan sekretariat bersama (Rp. 108.709.600)  
Kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan regional kalimantan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program regional Kalimantan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan regional Kalimantan, terealisasi Rp. 101.834.600 (93,68%)
- b. Ekspose perencanaan pembangunan daerah (Rp. 34.960.000) Kegiatan berupa sosialisasi/publikasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah, terealisasi Rp. 19.445.000 (55,62%)
- c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Rp. 58.008.850)  
Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dalam rangka penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tahun 2021 demi terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program pembangunan lintas sektor dan daerah di Provinsi Kalteng, terealisasi sebesar Rp. 56.437.580 (97,29%)
- d. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD (Rp. 196.449.250)  
Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun RKPD dan perubahan RKPD menghasilkan dokumen perencanaan tahunan provinsi Kalimantan Tengah sebagai penjabaran

- RPJMD dan terealisasi Rp. 196.209.309 (99,88%)
- e. Penyusunan KUA dan PPAS APBD (Rp. 36.656.000)  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun KUA dan PPAS APBD yang menghasilkan bahan penyusunan RAPBD TA.2021, terealisasi sebesar Rp. 36.656.000 (100%)
- f. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD (Rp. 2.505.000)  
Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD yang menghasilkan dokumen bahan penyusunan perubahan APBD 2020, terealisasi Rp. 2.505.000 (100%)
- g. Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota (Rp. 3.183.250)  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengkoordinasi Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota terealisasi Rp. 3.183.250 (100%)
- h. Koordinasi Perencanaan Pendanaan Prioritas Nasional dan DAK (Rp. 2.899.000)  
Kegiatan untuk usulan pendanaan prioritas nasional tahun 2022 dan usulan DAK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan tercapainya keterpaduan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terealisasi Rp. 2.899.000 (100%)
- i. Pemantapan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rp. 115.009.198)  
Untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappedalitbang menghasilkan dokumen Renja 2022, P-Renja 2021, RKA 2022, RKAP 2021, LPPD dan dokumen perencanaan terkait lainnya terealisasi Rp. 99.112.546 (86,18%)
- j. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 199.095.000)  
Kegiatan ini dalam rangka penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, terealisasi Rp. 132.140.500 (95,00%)  
Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 112.903.350)  
Kegiatan ini dalam rangka penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng tahun 2022 demi terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program pembangunan lintas sektor dan daerah di Provinsi Kalteng, terealisasi Rp. 122.245.850 (99,42%)
- k. Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rp. 58.410.836)  
Kegiatan ini dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan nasional, terealisasi Rp. 58.410.836 (100%)
- l. Penyusunan Master Plan/Grand Design Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2045 (Rp. 157.026.100)  
Kegiatan ini dalam rangka penyusunan dokumen Master Plan/Grand Design

Pembangunan Kalimantan Tengah, terealisasi Rp. 94.394.400 (60,11%)

#### **9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp. 24.223.000)  
Kegiatan berupa koordinasi perencanaan lingkup bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral untuk percepatan ekonomi daerah, terealisasi Rp. 24.221.650 (99,99%)
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan (Rp. 56.615.551)  
Kegiatan berupa koordinasi perencanaan lingkup bidang pertanian, ketahanan pangan, kelautan perikanan untuk percepatan ekonomi daerah, terealisasi Rp. 53.960.051 (95,31%)
- c. Koordinasi dan Konsultasi Analisis Ekonomi Regional (Rp. 28.526.400)  
Kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi regional PDRB se-Kalteng dan se-Kalimantan untuk memperoleh kesepakatan bagi peningkatan perekonomian di Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan, terealisasi Rp. 28.992.400 (99,53%)
- d. Penyusunan Laporan PEP RAD GRK Kalteng (Rp. 23.148.000)  
Kegiatan berupa dokumen laporan PEP RAD GRK dalam rangka keterpaduan perencanaan SDA dan LH dalam upaya penurunan emisi GRK, terealisasi Rp. 19.671.000 (84,98%)
- e. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal (Rp. 60.803.000)  
Kegiatan berupa koordinasi perencanaan lingkup bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal, terealisasi Rp. 60.780.400 (99,96%)

#### **10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Rp. 29.748.165)  
Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan lingkup bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terealisasi Rp. 29.339.565 (98,63%)
- b. Asistensi program kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (Rp. 14.254.250)  
Kegiatan yang dilaksanakan berupa asistensi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan

kewilayahan, terealisasi Rp. 11.291.750 (79,22%)

- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp. 116.410.673)

Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan, terealisasi Rp. 107.916.773 (92,70%)

- d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Rp. 33.466.904)

Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan lingkup bidang Pemukiman, kawasan Pemukiman dan Pertanahan, terealisasi Rp. 33.326.904 (99,58%)

- f. Koordinasi dan Fasilitasi Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Bahan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur (Rp. 538.523.686)

Kegiatan yang dilaksanakan dokumen hasil koordinasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur terealisasi Rp. 500.388.911 (92,92%)

#### **11. Program Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah**

- a. Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah (Rp. 11.186.000)

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Bappedalitbang tahun 2020 dan LKIP per-triwulanan tahun 2020, terealisasi Rp. 9.058.500 (80,98%)

- b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Rp. 4.992.500)

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik melalui rapat-rapat koordinasi maupun tinjauan ke lapangan, terealisasi Rp. 2.360.000 (47,27%)

- c. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 28.140.375)

Kegiatan dilaksanakan melalui rapat koordinasi, pengumpulan data dan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menghasilkan dokumen hasil evaluasi RKPD tahun 2019, sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan, terealisasi Rp. 27.083.100 (96,24%)

- d. Penyerahan DIPA/DPA Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 0)

kegiatan ini mengalami rasionalisasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Kalimantan Tengah.

- f. Koordinasi Pengendalian pelaksanaan program-program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 7.922.545)

Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan data realisasi pelaksanaan serta permasalahan program prioritas dalam rangka pengendalian pelaksanaan program-program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah, terealisasi Rp. 6.262.500 (79,05%)

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Program-Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 230.000.000)

Kegiatan merupakan rapat koordinasi yang dilaksanakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan berupa data realisasi pelaksanaan kemajuan fisik dan keuangan provinsi dan kabupaten/kota, realisasi pendapatan, permasalahan yang dihadapi serta solusi/upaya pemecahan masalah, terealisasi Rp. 199.718.550 (86,83%)

- f. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 7.568.895)

Kegiatan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sehingga rencana pembangunan dapat terkendali, terealisasi sebesar Rp. 7.545.145 (98,48%)

## **12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan**

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan (Rp. 65.662.939)

Kegiatan berupa koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, politik, hukum dan keamanan dalam meningkatkan kondisi pemerintahan, politik, hukum dan keamanan, terealisasi Rp. 55.161.939 (84,01%)

- b. Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Rp. 12.329.000)

Kegiatan yang dilaksanakan berupa asistensi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, terealisasi Rp. 12.329.000 (100%)

- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesra (Rp. 58.733.266)

Kegiatan berupa koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesra dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan kesra, terealisasi Rp. 56.051.466 (95,43%)

- f. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 0)

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Kalimantan Tengah.



- g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Budaya, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan (Rp. 52.443.359)  
Kegiatan berupa koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda, olahraga, budaya, Pariwisata perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan tingkat pendidikan, pemuda, olah raga, budaya, perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Kalimantan Tengah terealisasi Rp. 28.657.359 (54,64%)

### **13. Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan**

- a. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah (Rp. 180.869.302)  
Kegiatan dilaksanakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan, terealisasi Rp. 156.994.277 (86,80%).
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's (RAD – TPB/SDG's) (Rp. 2.395.000)  
Kegiatan berupa koordinasi dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG (RAD – TPB/SDG's), dengan realisasi sebesar Rp. 2.395.000 (100%)
- c. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD–TPB/SDG's (Rp. 1.205.000)  
Kegiatan berupa koordinasi percepatan pencapaian target RAD- TPB/SDG's dalam rangka penyusunan dokumen capaian pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's (RAD - TPB/SDG's), terealisasi Rp. 1.205.000 (100%)
- d. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-Pangan Gizi, GERMAS dan Pencegahan Stunting Rp. 24.876.685  
Kegiatan berupa koordinasi percepatan RAD-Pangan Gizi, GERMAS dan Pencegahan Stunting target terealisasi Rp. 24.876.685 (100%)

### **14. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK**

- a. Penerbitan dan publikasi buletin litbang (Rp. 41.500.000)  
Kegiatan dilaksanakan berupa penerbitan dan publikasi buletin litbang sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan/ stakeholder terkait, terealisasi Rp. 35.135.000 (84,66%)
- b. Rakorlitbang dan IPTEK (Rp. 14.412.600)  
Kegiatan yang dilaksanakan berupa ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan rakornas litbang tingkat Provinsi se-Kalimantan Tengah untuk menguatkan fungsi kelitbang dalam rangka penyusunan rancangan tentang inovasi daerah,

kelembagaan dan manajemen litbang, dengan realisasi sebesar Rp. 14.412.600 (100%)

- c. Koordinasi Kelitbangan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Rp. 36.188.200)  
Kegiatan berupa pelaksanaan koordinasi dan monitoring Bidang Penelitian dan pengembangan, terealisasi Rp. 36.188.200 (100%)
- d. Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 16.056.400)  
Kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan realisasi sebesar Rp. 16.056.400 (100%)

#### **15. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK**

- a. Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 161.469.100)  
Kegiatan berupa rapat dalam penyusunan dokumen hasil musyawarah DRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang strategi dan kebijakan pembangunan daerah, terealisasi Rp. 160.887.950 (99,64%)
- b. Peningkatan Pelayanan Izin Penelitian Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 34.404.000)  
Kegiatan ini mengeluarkan surat izin penelitian, terealisasi Rp. 34.379.000 (99,93%)
- c. Sosialisasi dan Penguatan Penyusunan Data Indeks Inovasi Daerah (Rp. 11.091.000)  
Kegiatan ini berupa pelaksanaan Sosialisasi dan Penguatan Penyusunan Data Indeks Inovasi Daerah, terealisasi Rp. 11.091.000 (100%)

Secara keseluruhan hampir semua program dan kegiatan dapat berjalan/dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan optimal disebabkan karena adanya kendala teknis. Untuk mengatasinya di masa mendatang, program dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat terlihat dari tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah s/d Tahun 2021.

**TABEL 2-1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDALITBANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDALITBANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat tahun Tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
4.01	<b>Bidang Perencanaan</b>										
4.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	%	500	100	100	100	100	100	100	100
4.01 . 01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun dan terlaksananya administrasi	surat	2.000	100	500	500	100	500	500	100
4.01 . 01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik, telpon, dan PDAM	KWH, 3 titik PDAM, 8 Line(telp. dan speedy)1 Astinet Lite dan 1 VPS	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	polis	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpelihara kendaraan operasional Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	bulan	48	100	12	12	100	12	12	100
4.01 . 01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan, operator komputer dan tersedianya dokumen administrasi keuangan	dokumen; 20 org Honor pengelola keuangan	4	100	1	1	100	1	1	100

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	jenis alat kebersihan dan jenis peralatan pembersih	50		23	23	100	27	27	66,67
4.01 . 01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	tahun	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	tahun	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.011	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	tahun	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	18		6	6	100	12	12	66,67
4.01 . 01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	buah AC Standing 3 PK, 1 Buah AC Split 2 PK	9		5	5	100	4	4	66,67
4.01 . 01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) dan tersedianya buku peraturan Perundang-Undangan	jenis	8		4	4	100	4	4	66,67
4.01 . 01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi	Tahun	2		1	1	100	1	1	66,67
4.01 . 01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan/terlaksananya/koordinasi/konsultasi/konfirmasi/konsultasi ke pusat/daerah lainnya	tahun; 50 Laporan	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keikutsertaan/terlaksananya/koordinasi/konfirmasi ke dalam daerah	tahun; 50 Laporan	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 01.023	Pembinaan non PNS	Terlaksananya Pembinaan NON PNS	orang tenaga kontrak	105		41	41	100	64	64	66,67
4.01 . 01.024	Biaya pembayaran instruktur senam	Terselenggaranya senam pagi pada hari jumat dengan instruktur senam	bulan	24		12	12	100	12	12	66,67
		Bantuan biaya perjalanan berobat ASN	orang	10		10					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	%	300	100	100	75	75			58,33
		Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	buah kursi kerja	64		64	64	100			33,33
4.01 . 02.010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubeler kantor	Buah Kursi Makan	34		34	34	100			33,33
4.01 . 02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2		1			1	1	33,33
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan penataan taman	paket	1		1	1	100			33,33
		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	%	300	100	100	75	75			58,33
		Tersedianya pakaian batik tradisional khas Kalteng dan baju olahraga bagi ASN dan Tenaga Kontrak Bappedalitbang Prov. Kalimantan Tengah	Pegawai Bappedalitbang Prov. Kalteng	134		134	134	100			33,33
4.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	400	100	100	100	100	100	100	100
4.01 . 05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Formal	orang	10		8	8	100	2	2	66,67
		Terlatihnya Aparatur Perencana Provinsi Kab/Kota dalam penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja	Orang	150		150	150	100			33,33
		Terlatihnya aparatur dalam pengolahan dan analisa data pembangunan dalam bentuk info grafis untuk bahan perencanaan	orang	100		100					
4.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	%	400	100	100	100	100	100	95	98,33

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan	dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 06.091	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya koordinasi dan implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	dokumen	1					1		
<b>4.01 . 08</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>	<b>Dokumen pengelolaan aset/barang daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>1</b>					<b>33,33</b>
4.01 . 08.001	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan inventarisasi/barang daerah	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
<b>4.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi</b>	<b>%</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>1</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>
4.01 . 15.031	Pengelolaan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen database pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berbasis SIPD	dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 15.033	Pengumpulan Pengolahan dan analisa data / informasi dan geospasial	Tersedianya Data Informasi Pembangunan dan Geospasial	dokumen	3	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 15.035	Pengembangan e-planning (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tersedianya database untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, PPAS) dan peningkatan SDM standar eksekutif dan legislatif	database	3	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 15.036	Pengembangan e-monev (Sistem Informasi Monitoring Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah)	Terlaksananya sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	dokumen/paket database	3	100	1	1	100	1	1	100

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 15.039	Penyediaan dan Pengelolaan Data Geospasial Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya data dan informasi Geospasial Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung Kebijakan Satu Peta	database	2		1	1	100	1	1	66,67
4.01 . 15.040	Pengumpulan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Tersedianya media data perencanaan pembangunan untuk analisis pembangunan	dokumen	2		1	1	100	1		33,33
4.01 . 15.041	Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Website Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah dan media informasi online Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen; 1 tahun	2		1	1	100	1	1	66,67
<b>4.01 . 16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Jumlah kerjasama</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>1</b>					<b>33,33</b>
4.01 . 16.007	Kerjasama Pembangunan Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama dalam dan luar negeri	dokumen	3	100	1	1	100	1	1	100
<b>4.01 . 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan</b>	<b>dokumen</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>19</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>66,67</b>
4.01 . 21.021	Koordinasi perencanaan pembangunan Regional Kalimantan dan Sekretariat Bersama	Jumlah Dokumen perencanaan program pembangunan regional Kalimantan serta terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan Regional Kalimantan	dokumen; 1 tahun	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 21.035	Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya sosialisasi/publikasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.01 . 21.056	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Tersusunnya rancangan RKPDP tahun 2021 hasil kesepakatan musrenbang	dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 21.057	Penyusunan RKPDP dan Perubahan RKPDP	Tersusunnya dokumen Pergub RKPDP tahun 2021 dan Pergub P-RKPDP Tahun 2020	dokumen	4		2	2	100	2	2	66,67
4.01 . 21.058	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD sebagai acuan penyusunan R-APBD TA. 2021	dokumen	8	100	2	2	100	2	2	100

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 21.059	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen bahan penyusunan perubahan APBD TA. 2020 (KUPA dan PPAS-P)	dokumen	8	100	2	2	100	2	2	100
4.01 . 21.060	Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Dokumen hasil koordinasi, pembinaan dan evaluasi perencanaan kabupaten/kota	dokumen	28		14	14	100	14	14	66,67
4.01 . 21.061	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Prioritas Nasional dan DAK	Tersusunnya usulan pendanaan Prioritas nasional dan usulan DAK Prov.Kalimantan Tengah Tahun 2021	dokumen	4		2	2	100	2	2	66,67
4.01 . 21.063	Pemantapan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkup Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	14	100	4	4	100	6	6	100
4.01 . 21.064	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya rancangan awal teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalteng	dokumen	1					1	1	33,33
4.01 . 21.067	Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya kompilasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	dokumen	3	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 21.068	Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja teknis Tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
		Tersusunnya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021	dokumen	1		1					
4.01 . 21.070	Penyusunan Master Plan/Grand Design Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2045	Tersusunnya masterplan/grand design pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2045	dokumen	1					1		
<b>4.01 . 22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA dan Kerjasama</b>	<b>-</b>								
4.01 . 22.020	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS dan Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67



1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 22.022	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS dan Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan	Dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
4.01 . 22.024	Koordinasi dan Konsultasi Analisis Ekonomi Regional	Hasil kesepakatan konsultasi Regional PDRB se-Kalimantan Tengah dan se-Kalimantan serta terlaksananya rapat koordinasi bidang perekonomian	Dokumen	5		3	3	100	2	2	66,67
4.01 . 22.025	Penyusunan Laporan PEP RAD GRK Kalteng	Tersusunnya dokumen laporan PEP RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.01 . 22.026	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS, Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal	Dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
<b>4.01 . 24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>										
4.01 . 24.007	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Tersusunnya rancangan Renja PD, P-Renja PD, RKPD, P-RKPD, PPAS, PPAS-P, dan usulan kegiatan APBN/DAK lingkup Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
4.01 . 24.024	Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.01 . 24.031	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS, Usulan Kegiatan APBN/DAK PD lingkup Bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, fasilitasi program PPSP	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 24.032	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS,P-PPAS, Usulan Kegiatan APBN/DAK PD lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
4.01 . 24.033	Koordinasi dan Fasilitasi Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya dokumen hasil koordinasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur	dokumen	1					1	1	33,33
<b>4.01 . 37</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>										
4.01 . 37.001	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersusunnya laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Bappedalitbang Prov. Kalteng	dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
4.01 . 37.002	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota	dokumen	8		4	4	100	4	4	66,67
4.01 . 37.005	Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019	dokumen	3		2	2	100	1	1	66,67
4.01 . 37.008	Penyerahan DIPA/DPA Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya penyerahan DIPA/DPA Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan	Dokumen	1		1	1	100			33,33
4.01 . 37.009	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program-Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program-program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	3		2	2	100	1	1	66,67
4.01 . 37.013	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Program-Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya RAKORDAL Triwulan I, II, III	dokumen	8		4	4	100	4	4	66,67
		Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappedalitbang	dokumen	1		1	1	100			33,33

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 37.015	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
<b>4.01 . 39</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan</b>										
4.01 . 39.003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan	Tersusunnya rancangan Renja PD, P-Renja PD, RKPD,P-RKPD, PPAS, PPAS-P, dan usulan kegiatan APBN/DAK lingkup Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
		Dokumen Hasil Perencanaan RAD PPK	dokumen	1		1					
4.01 . 39.005	Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
4.01 . 39.006	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesra	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS,P-PPAS, dan usulan kegiatan APBN/DAK lingkup Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesra	dokumen	14		7	7	100	7	7	66,67
4.01 . 39.007	Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya aksi nasional hak azasi manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	1		1	1	100			33,33
4.01 . 39.008	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Budaya, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS,P-PPAS, dan usulan kegiatan APBN/DAK lingkup Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Budaya, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan	dokumen	8		1	1	100	7	7	66,67
<b>4.01 . 40</b>	<b>Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan</b>										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 40.001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	dokumen	4		2	2	100	2	2	66,67
		Terlaksananya Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)	dokumen	1		1	1	100			33,33
4.01 . 40.003	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (RAD-TPB/SDGs)	Tersedianya dokumen Rencana Aksi daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	dokumen	3		2	2	100	1	1	66,67
		Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-Pangan dan Gizi	dokumen	1		1	1	100			33,33
4.01 . 40.005	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-TPB/SDGs	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian target RAD-TPB/SDGs	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
		Tersedianya laporan hasil koordinasi Basis Data Terpadu (BDT) Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	1		1	1	100			33,33
4.01 . 40.007	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-Pangan Gizi, GERMAS dan Pencegahan Stunting	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian target RAD-Pangan Gizi, GERMAS, dan Pencegahan Stunting	dokumen	3					3	3	33,33
<b>4.05</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>										
<b>4.05 . 27</b>	<b>Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK</b>										
4.05 . 27.002	Penerbitan dan publikasi buletin litbang	Terbitnya buletin litbang	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.05 . 27.016	Rakorlitbang dan IPTEK	Terselenggaranya Rakorlitbang dan IPTEK di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.05 . 27.017	Koordinasi Kelitbangan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Bidang Penelitian dan Pengembangan	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.05 . 27.018	Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi daerah Provinsi Kalteng	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
<b>4.05 . 28</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan IPTEK</b>										
4.05 . 28.001	Koordinasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya program jakstrada dan agenda riset daerah	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
4.05 . 28.003	Peningkatan Pelayanan Izin Penelitian Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya Surat Izin penelitian	dokumen	2		1	1	100	1	1	66,67
		Tersusunnya Rencana Kerja Kelitbangan Tahun 2020	dokumen	1		1	1	100			33,33
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kelitbangan	orang	5		5					
4.05 . 28.006	Sosialisasi dan Penguatan Penyusunan Data Indeks Inovasi Daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi data IDSD dan IGA	dokumen	1					1	1	33,33
4.05 . 28.006		Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi data IDSD dan IGA	dokumen	1					1	1	33,33

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang**

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, yaitu perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian dan evaluasi, misi yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensii daerah.
2. Melaksanakan koordinasi yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah .
4. Melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, maka hasil evaluasi terhadap capaian kinerja urusan wajib bidang perencanaan pembangunan yaitu :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Tahun 2005-2025
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDP Tahun 2022 dan P-RKPDP Tahun 2021

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output dokumen perencanaan yang dihasilkan.

## **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappedalitbang Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- f. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- g. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan.
- h. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya.
- i. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- j. Penyelenggaraan pengkoordinasi penelitian dan pengembangan daerah.
- k. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan.
- l. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah.
- m. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan.
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah terhadap capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Bappedalitbang tahun 2016-2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD cukup sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan antar instansi Provinsi maupun pihak dunia usaha, LSM, Tokoh Masyarakat, masyarakat akademis, asosiasi dan profesi perlu dibangun secara optimal

- c. Pelayanan terhadap ijin penelitian/rekomendasi yang dikeluarkan Bappedalitbang kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah maupun masyarakat dan mahasiswa cukup baik, namun kendala saat ini dilakukan masih secara manual diharapkan kedepannya dapat dilakukan secara online untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. SDM di BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal baik dalam jumlah personil perencana dan teknis maupun dari segi kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu dalam perkembangannya di masa yang akan datang hal tersebut kiranya masih perlu dioptimalkan;
- b. SDM dengan latar belakang disiplin ilmu program studi ekonomi dan administrasi publik relatif cukup, namun program studi lain (perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, planologi, transportasi, kelautan), programer komputer masih kurang mencukupi kebutuhan perencanaan secara komprehensif;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan professional di bidang Perencanaan
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi, karena dengan intensitas kerja yang tinggi belum didukung dengan peralatan kerja yang mumpuni (teknologi baru).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2016, Susunan Organisasi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) bidang, yakni:

#### **1. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Litbang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menentukan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.

#### **2. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Pembangunan Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.



### **3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

### **4. Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama**

Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama, Lingkungan Hidup, kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan.

### **5. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan**

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Kesejahteraan rakyat, Penelitian dan pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **6. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan.

Sumberdaya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah mencukupi, hal ini jika dilihat dari struktur jabatan, jumlah pegawai, pangkat/golongan, maupun jenjang pendidikannya. Jumlah pegawai pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah per sampai dengan 4 Januari 2021 sebanyak 62 orang ASN dan 61 Tenaga Kontrak, dengan perincian eselonering, kepangkatan/golongan, jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Jumlah ASN : 62 orang
- b. Pangkat/Golongan :

- 1) Golongan IV : 12 orang
- 2) Golongan III : 38 orang
- 3) Golongan II : 12 orang
- c. Berdasarkan Pendidikan :
  - 1) S 2 : 12 orang
  - 2) S 1 : 35 orang
  - 3) Sarjana Muda/D-III : 2 orang
  - 4) SLTA : 13 orang
  - 5) SD : -
- d. Berdasarkan Eselonering :
  - 1) Eselon II : 1 orang
  - 2) Eselon III : 6 orang
  - 3) Eselon IV : 15 orang
- e. Jabatan Fungsional Tertentu :
  - 1) Pejabat Fungsional Perencana : 4 orang
  - 2) Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan : 1 orang
  - 3) Pejabat Fungsional Pranata Komputer : 1 orang
  - 4) Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama : 1 orang
- f. Tenaga Kontrak : 61 orang

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada bagian ini dapat kami review terhadap rancangan awal RKPD Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 2 -2.

**TABEL 2-2**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>					
	<b>PERENCANAAN</b>				24.228.645.336	<b>PERENCANAAN</b>				24.228.645.336	
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				16.279.241.686	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				16.279.241.686	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah		435.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah		435.950.000	
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	3 dok	242.950.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	3 dok	242.950.000	
2	- Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	35.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	35.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	35.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	35.000.000	
4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Tercapainya hasil laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD setiap bulan	1 dok	73.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Tercapainya hasil laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD setiap bulan	1 dok	73.000.000	
5	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	1 dok	50.000.000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	1 dok	50.000.000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen administrasi Keuangan dan gaji ASN</b>		<b>11.207.397.186</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen administrasi Keuangan dan gaji ASN</b>		<b>11.207.397.186</b>	
1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Bappedalitbang Prov. Kalteng	67 ASN	10.560.253.586	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Bappedalitbang Prov. Kalteng	67 ASN	10.560.253.586	
2	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kalteng	Terbayarnya Honorarium Pengelola keuangan, Belanja Barang dan Penggandaan untuk menunjang pengelolaan administrasi keuangan	1 dok	504.143.600	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kalteng	Terbayarnya Honorarium Pengelola keuangan, Belanja Barang dan Penggandaan untuk menunjang pengelolaan administrasi keuangan	1 dok	504.143.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan yang baik didalam memproses verifikasi spj sesuai dgn aturan yang berlaku	1 dok	67.000.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan yang baik didalam memproses verifikasi spj sesuai dgn aturan yang berlaku	1 dok	67.000.000	
4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun, dijurnal yang berbasis aktual	1 dok	45.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun, dijurnal yang berbasis aktual	1 dok	45.000.000	
5	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran data dari rekonsiliasi keuangan aset tetap dan persediaan	1 dok	21.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran data dari rekonsiliasi keuangan aset tetap dan persediaan	1 dok	21.000.000	
6	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Tersedianya laporan penjabaran realisasi anggaran per 6 bulan atau semester pertama	1 dok	10.000.000	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Tersedianya laporan penjabaran realisasi anggaran per 6 bulan atau semester pertama	1 dok	10.000.000	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan inventarisasi/barang daerah dan Asuransi Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah</b>		<b>93.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan inventarisasi/barang daerah dan Asuransi Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah</b>		<b>93.000.000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya anggaran untuk Polis Asuransi Ktr Bappedalitbang selama 1 tahun dan Pengelolaan Aset Bappedalitbang	1 dok, polis asuransi	93.000.000	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya anggaran untuk Polis Asuransi Ktr Bappedalitbang selama 1 tahun dan Pengelolaan Aset Bappedalitbang	1 dok, polis asuransi	93.000.000	
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya kapasitas aparatur kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya kapasitas aparatur kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100.000.000</b>	
1	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kalteng	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	50.000.000	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kalteng	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dok	50.000.000	
2	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal sesuai tugas dan fungsi	8 org	50.000.000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal sesuai tugas dan fungsi	8 org	50.000.000	
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>		<b>965.184.500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>		<b>965.184.500</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan Kantor berupa alat tulis kantor	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan Kantor berupa alat tulis kantor	12 bulan	60.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	115.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	115.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	108.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	108.500.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan surat-surat/dokumen	12 bulan	66.684.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan surat-surat/dokumen	12 bulan	66.684.500	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan Tersedianya buku peraturan-undangan	4 jenis	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan Tersedianya buku peraturan-undangan	4 jenis	35.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Keikutsertaan/ terlaksananya/ koordinasi /konsultasi /konfirmasi/ konsultasi ke pusat daerah lainnya dan ke dalam daerah	12 bulan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Keikutsertaan/ terlaksananya/ koordinasi /konsultasi /konfirmasi/ konsultasi ke pusat daerah lainnya dan ke dalam daerah	12 bulan	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1 dokumen	180.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Tersedianya penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1 dokumen	180.000.000	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.019.780.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.019.780.000</b>	
1	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun dan terlaksananya administrasi	12 bulan	7.950.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun dan terlaksananya administrasi	12 bulan	7.950.000	
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Terlaksananya pembayaran jasa telepon internet, air, dan listrik	12 bulan	783.000.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Terlaksananya pembayaran jasa telepon internet, air, dan listrik	12 bulan	783.000.000	
3	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terselenggaranya pelayanan umum kantor berupa sosialisasi/publikasi perencanaan, pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah, pegawai non PNS/tenaga kontrak dan senam pagi oleh instruktur senam	61 tenaga kontrak	2.228.830.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terselenggaranya pelayanan umum kantor berupa sosialisasi/publikasi perencanaan, pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah, pegawai non PNS/tenaga kontrak dan senam pagi oleh instruktur senam	61 tenaga kontrak	2.228.830.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	457.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	457.930.000	
1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kalteng	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau jabatan dan operasional	19 unit	283.050.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kalteng	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau jabatan dan operasional	19 unit	283.050.000	
2	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	74.880.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	74.880.000	
3	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	100.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	100.000.000	
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				4.240.312.750	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				4.240.312.750	
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		2.730.652.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		2.730.652.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dok	280.000.000	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tersusunnya Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dok	280.000.000	
2	- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Prov. Kalteng	Terlaksananya koordinasi penelaahan dokumen perencanaan dengan dokumen kebijakan lainnya dan Tersusunnya dokumen perencanaan Program Pembangunan Regional Kalimantan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Regional Kalimantan	2 dok	280.000.000	- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Prov. Kalteng	Terlaksananya koordinasi penelaahan dokumen perencanaan dengan dokumen kebijakan lainnya dan Tersusunnya dokumen perencanaan Program Pembangunan Regional Kalimantan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Regional Kalimantan	2 dok	280.000.000	
3	- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen hasil konsultasi Publik	2 dok	325.492.000	- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen hasil konsultasi Publik	2 dok	325.492.000	
4	- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah didalam penyusunan Rancangan Awal RKPD	1 dok	466.500.000	- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Prov. Kalteng	Tersusunnya Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah didalam penyusunan Rancangan Awal RKPD	1 dok	466.500.000	
5	- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Prov. Kalteng	Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Hasil Musrenbang Provinsi	1 dok	697.360.000	- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Prov. Kalteng	Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Hasil Musrenbang Provinsi	1 dok	697.360.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kalteng	Tersusnya dan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, usulan pendanaan Prioritas Nasional dan Usulan DAK Provinsi Kalimantan Tengah	4 dok	681.300.000	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kalteng	Tersusnya dan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, usulan pendanaan Prioritas Nasional dan Usulan DAK Provinsi Kalimantan Tengah	4 dok	681.300.000	
9	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>655.660.750</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>655.660.750</b>	
1	- Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dok	120.660.750	- Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dok	120.660.750	
2	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dan terlaksananya penyerahan DIPA/DPA Prov. Kalteng	2 dok	260.000.000	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dan terlaksananya penyerahan DIPA/DPA Prov. Kalteng	2 dok	260.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Tersusunnya Rencana kerja teknis tahun 2023 Prov. Kalteng	1 dok	275.000.000	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Tersediannya database Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Tersusunnya Rencana kerja teknis tahun 2023 Prov. Kalteng	1 dok	275.000.000	
<b>10</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan</b>		<b>Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD</b>		<b>854.000.000</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan</b>		<b>Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD</b>		<b>854.000.000</b>	
1	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Prov. Kalteng	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	240.000.000	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Prov. Kalteng	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	240.000.000	
2	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	359.000.000	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kalteng	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	359.000.000	
3	- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Tingkat Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kota	100%	255.000.000	- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Tingkat Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kota	100%	255.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3.709.090.900	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3.709.090.900	
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Tersusunnya Perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan		1.048.749.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Tersusunnya Perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan		1.048.749.500	
1	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan	1 dok	151.949.500	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan	1 dok	151.949.500	
2	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dok	71.200.000	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dok	71.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kalteng	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah	1 dok	87.900.000	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kalteng	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah	1 dok	87.900.000	
4	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kesra dan Rencana Aksi Daerah SDGs	3 dok	582.700.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kesra dan Rencana Aksi Daerah SDGs	3 dok	582.700.000	
5	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target RAD-PG, GERMAS dan PUG	3 dok	155.000.000	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kalteng	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target RAD-PG, GERMAS dan PUG	3 dok	155.000.000	
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam		780.048.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam		780.048.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang perekonomian	8 dok	281.148.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang perekonomian	8 dok	281.148.000	
2	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya asistensi dalam peningkatan keterpaduan, keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun oleh perangkat daerah	1 dok	90.300.000	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya asistensi dalam peningkatan keterpaduan, keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun oleh perangkat daerah	1 dok	90.300.000	
3	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 dok	74.600.000	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 dok	74.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan dalam peningkatan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan daeran bidang perekonomian	1 dok	98.000.000	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan dalam peningkatan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan daeran bidang perekonomian	1 dok	98.000.000	
5	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang SDA	4 dok	140.000.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang SDA	4 dok	140.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA serta tersedianya laporan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).	1 dok	96.000.000	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA serta tersedianya laporan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).	1 dok	96.000.000	
13	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>1.880.293.400</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>1.880.293.400</b>	
1	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya rancangan Renja PD, Perubahan Renja-PD, RKPD, Perubahan RKPD bidang infrastruktur, serta terselenggaranya koordinasi Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi	4 dok	750.000.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya rancangan Renja PD, Perubahan Renja-PD, RKPD, Perubahan RKPD bidang infrastruktur, serta terselenggaranya koordinasi Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi	4 dok	750.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik)	1 dok	100.000.000	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik)	1 dok	100.000.000	
3	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 dok	139.793.400	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 dok	139.793.400	
4	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik)	3 dok	200.000.000	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik)	3 dok	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah mendukung tata ruang dan pengembangan wilayah	1 dok	135.000.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kalteng	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah mendukung tata ruang dan pengembangan wilayah	1 dok	135.000.000	
6	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur	2 dok	555.500.000	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kalteng	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur	2 dok	555.500.000	
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.551.317.000</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.551.317.000</b>	
IV.	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan		<b>1.551.317.000</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan		<b>1.551.317.000</b>	
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Pusat dan Daerah		<b>655.592.000</b>	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Pusat dan Daerah		<b>655.592.000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	- Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Prov. Kalteng	Tersusunnya Dokumen rencana pembangunan Kalteng 2045 dan Dokumen Laporan Pelaksanaan, Koordinasi Kelitbangan	2 dok	444.616.000	- Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Prov. Kalteng	Tersusunnya Dokumen rencana pembangunan Kalteng 2045 dan Dokumen Laporan Pelaksanaan, Koordinasi Kelitbangan	2 dok	444.616.000	
2	- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Rakorlitbang dan tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi	1 dok	150.976.000	- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Rakorlitbang dan tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi	1 dok	150.976.000	
3	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Pelayanan Izin Penelitian	1 dok	60.000.000	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Pelayanan Izin Penelitian	1 dok	60.000.000	
15	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan</b>		<b>Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan</b>		<b>274.000.000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan</b>		<b>Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan</b>		<b>274.000.000</b>	
1	- Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	137.000.000	- Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	137.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Kajian Budidaya Ikan di Kalteng	1 dok	137.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Prov. Kalteng	Terlaksananya Kajian Budidaya Ikan di Kalteng	1 dok	137.000.000	
16	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Terlaksananya Inovasi Daerah Untuk meningkatkan Perkembangan Teknologi di Kalimantan Tengah</b>		<b>621.725.000</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Terlaksananya Inovasi Daerah Untuk meningkatkan Perkembangan Teknologi di Kalimantan Tengah</b>		<b>621.725.000</b>	
1	- Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Prov. Kalteng	Terwujudnya Inovasi di setiap Perangkat Daerah	2 dok	546.725.000	- Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Prov. Kalteng	Terwujudnya Inovasi di setiap Perangkat Daerah	2 dok	546.725.000	
2	- Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Prov. Kalteng	Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang	1 dok	75.000.000	- Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Prov. Kalteng	Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang	1 dok	75.000.000	
<b>Jumlah</b>					<b>25.779.962.336</b>						<b>25.779.962.336</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat**

Untuk Rancangan Renja tahun 2022, usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh melalui usulan dalam pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang pada tahun 2019 serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Usulan masyarakat melalui Musrenbang secara berjenjang dari Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang tingkat Provinsi tersebut kemudian diakomodir melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus terakomodir pada Renja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, karena umumnya usulan tersebut masyarakat diarahkan pada SKPD teknis. Namun Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam Perencanaan pada SKPD terkait.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 sebagai unsur penunjang Pemerintah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian. Bappedalitbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan realistis, maka **proses** perencanaan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
  - a. **Teknokratik**, yaitu menggunakan kerangka berpikir ilmiah dan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. **Partisipatif**, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
  - c. **Top down and bottom up planning**, untuk memadukan antar perencanaan dari aspirasi lokal dengan kebijakan dari atas.
2. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perencanaan pembangunan daerah disusun dalam 4 (empat) **tahap**, yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

- a. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya

adalah melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

- b. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini untuk rencana tahunan RKPD dan P-RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk itu Bappedalitbang akan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

## **3.2 Tujuan dan Sasaran**

### **3.2.1. Tujuan**

Sesuai Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian/kajian yang sistematis dan komprehensif, dengan dukungan SDM perencana/litbang yang handal
2. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah



3. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dengan dukungan pengelolaan sistem informasi sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang selaku instansi yang menangani perencanaan pembangunan di daerah. Bappedalitbang diharapkan mampu menjalankan tupoksi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta fungsi kelitbang secara komprehensif.

### **3.2.2. Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis PD Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut:

**Pertama,** Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian/kajian yang sistematis dan komprehensif, dengan dukungan SDM perencana/litbang yang handal.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasarannya adalah:

1. Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sesuai tuntunan perundangan dan peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah

**Kedua,** Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasarannya adalah:

1. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten

**Ketiga,** Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat terlihat pada tabel 3-1 sebagai berikut:

**Tabel 3 - 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian/kajian yang sistematis dan komprehensif, dengan dukungan SDM perencana/litbang yang handal	1.1. Terwujudnya perencanaan daerah tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1.1.a Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1.2.b Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %
	1.2. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	1.2. Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	2.1 Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	2.1.a Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %
		2.1.b Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	85 %	-	-	-	-
		2.1.c Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %
		2.1.d Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %
3. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana	3.1 Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	3.1.a. Jumlah SOPD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95 % (fisik).	35 SOPD	36 SOPD	37 SOPD	38 SOPD	40 SOPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.							
		3.1.b. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %

### **3.3 Program dan Kegiatan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah terkait dengan kegiatan operasional Bappedalitbang adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappedalitbang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan (Aplikatif).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja operasi dan Belanja modal yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2022 di realisasikan melalui 4 program, 16 kegiatan dan sub kegiatan 64 sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

**4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

**8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
  - 5) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
  - 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- 9. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1) Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
  - 3) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
  - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - 3) Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia



## **12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

## **13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

### **III. Program Penelitian dan Pengembangan Dearah**

#### **14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

**15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**

1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan

2) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

**16. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

1) Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

2) Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan visi, misi dan tujuan perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu perangkat daerah serta satu-satunya lembaga perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Tengah, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan apabila ketiga komponen dasar perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan penjabaran dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Penjabaran visi, misi dan tujuan harus tetap mengacu kepada fungsi dan tugas pokok Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan melalui koordinasi, baik secara internal (lintas bidang), maupun eksternal (lintas perangkat kerja) secara efektif dan efisien dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural.

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2022 berpedomanan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan fokus pada aspek perencanaan maupun aspek pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dan aspek-aspek pendukung lainnya, seperti penyiapan, pengolahan serta penyajian data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif untuk tahun 2022 dengan indikator kinerja serta sumber pendanaan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

**TABEL 4-1**  
**RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						25.779.962.336,00							-	
	5.01	PERENCANAAN						24.228.645.336,00								
1.	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Tahun)</i>				1	16.279.241.686,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						435.950.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)</i>				3,00	242.950.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Tersusunnya dokumen RKA Bappedalitbang Provinsi Kalteng (dokumen)</i>				1,00	35.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Tersusunnya dokumen RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng (dokumen)</i>				1,00	35.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Tercapainya hasil laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD setiap bulan (dokumen)</i>				1,00	73.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)</i>				1,00	50.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.207.397.186,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.560.253.586,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Bappedalitbang Prov. Kalteng (orang)</i>					67,00		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						504.143.600,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Terbayarnya Honorarium Pengelola keuangan, Belanja Barang dan Penggandaan untuk menunjang pengelolaan administrasi keuangan (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				520.000.000		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						67.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan yang baik didalam memproses verifikasi spj sesuai dgn aturan yang berlaku (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						45.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun, dijurnal yang berbasis akrual (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						21.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran data dari rekonsiliasi keuangan aset tetap dan persediaan (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25.000.000		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		<i>Tersedianya laporan penjabaran realisasi anggaran per 6 bulan atau semester pertama (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15.000.000		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						93.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						93.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		<i>Tersedianya anggaran untuk Polis Asuransi Kantor Bappedalitbang selama 1 tahun dan Pengelolaan Aset Bappedalitbang (dok, polis asuransi)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1			
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Bappedalitbang Prov. Kalteng (Dokumen)</i>					1		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		<i>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal sesuai tugas dan fungsi (orang)</i>					8		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8			
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						965.184.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
										Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		<i>Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah (Bulan)</i>					12		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)					12			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		<i>Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)</i>					12		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		<i>Terlaksananya peralatan dan perlengkapan Kantor berupa alat tulis kantor (bulan)</i>					12,00		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga (bulan)</i>				12,00	115.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bulan)</i>				12	108.500.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan surat-surat/dokumen (bulan)</i>				12,00	66.684.500,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan (koran) dan Tersedianya buku peraturan-undangan (bulan)</i>				12	35.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Keikutsertaan/ terlaksananya/ koordinasi /konsultasi /konfirmasi/ konsultasi ke pusat daerah lainnya dan ke dalam daerah (Bulan)</i>				12	300.000.000,00	(14 Kabupaten/Kota dan Luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Tersedianya penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Dokumen)</i>				1,00	180.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.019.780.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak				- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun dan terlaksananya administrasi (Bulan)</i>				12	7.950.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Terlaksananya pembayaran jasa telepon internet, air, dan listrik (Bulan)</i>				12	783.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Terselenggaranya pelayanan umum kantor berupa sosialisasi/publikasi perencanaan, pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah, pegawai non PNS/tenaga kontrak dan senam pagi oleh instruktur senam (tenaga kontrak)</i>				61	2.228.830.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah (Bulan)</i>				12	457.930.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		12	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau jabatan dan operasional (Unit Kendaraan)</i>				19,00	283.050.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)</i>				12	74.880.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)</i>				1	100.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2.	5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b><i>Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)</i></b>				16	4.240.312.750,00			Ya	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.730.652.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Tersusnya Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (dokumen)</i>				1	280.000.000,00	<i>(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Terlaksananya koordinasi penelaahan dokumen perencanaan dengan dokumen kebijakan lainnya dan Tersusnya dokumen perencanaan Program Pembangunan Regional Kalimantan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Regional Kalimantan (Dokumen)</i>				2	280.000.000,00	<i>(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah dokumen hasil konsultasi Publik (Dokumen)</i>				2	325.492.000,00	<i>(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	<i>Tersusnya Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah didalam penyusunan Rancangan Awal RKP (Dokumen)</i>				1	466.500.000,00	<i>(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	<i>Tersusnya Rancangan Akhir RKP Hasil Musrenbang Provinsi (Dokumen)</i>				1	697.360.000,00	<i>(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						681.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Tersusnya dan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, usulan pendanaan Prioritas Nasional dan Usulan DAK Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen)</i>				4		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4		
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (persen)</i>				100	655.660.750,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Tersediannya database Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (Dokumen)</i>				1	120.660.750,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	<i>Tersediannya database Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dan terlaksananya penyerahan DIPA/DPA Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen)</i>				2,00	260.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersediannya database Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Tersusnya Rencana kerja teknis Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen)</i>				2,00	275.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD (persen)</i>				85	854.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		85	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						240.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat (persen)				85	359.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat (persen)				85	255.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Tingkat Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kota (persen)				100		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3.	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)				32	3.709.090.900,00			Tidak	Tidak				- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Dokumen)				9	1.048.749.500,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		9		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan (Dokumen)				1	151.949.500,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Dokumen)				1,00	71.200.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen)</i>				1	87.900.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Tersedianya dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kesra dan Rencana Aksi Daerah SDGs (Dokumen)</i>				3	582.700.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Tersedianya dokumen Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target RAD-PG, GERMAS dan PUG (Dokumen)</i>				3,00	155.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam (Dokumen)</i>				11	780.048.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		11		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKP dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang perekonomian (Dokumen)</i>				8,00	281.148.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,00		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Terlaksananya asistensi dalam peningkatan keterpaduan, keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun oleh perangkat daerah (Dokumen)</i>				1	90.300.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan dalam peningkatan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan daeran bidang perekonomian (Dokumen)</i>				1	74.600.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan dalam peningkatan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan daeran bidang perekonomian (Dokumen)</i>				1,00	98.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKP dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang SDA (Dokumen)</i>				4,00	140.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,00		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA serta tersedianya laporan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) (Dokumen)</i>				1	96.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5.01.5.05.0.00.0 1.00.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Dokumen)</i>				12	1.880.293.400,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		12		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya rancangan Renja PD, Perubahan Renja-PD, RKPD, Perubahan RKPD bidang infrastruktur, serta terselenggaranya koordinasi Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi (Dokumen)				4		(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (Dokumen)				1	139.793.400,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo, persandian dan statistik) (Dokumen)				3	200.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah mendukung tata ruang dan pengembangan wilayah (Dokumen)				1,00	135.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur (Dokumen)				2,00	555.500.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.551.317.000,00								
1.	5.05.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan (Dokumen)</i>				9	1.551.317.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Pusat dan Daerah (Dokumen)</i>				4	655.592.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak		4	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Tersusunnya Dokumen rencana pembangunan Kalteng 2045 dan Dokumen Laporan Pelaksanaan, Koordinasi Kelitbangan (Dokumen)</i>				2,00	444.616.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<i>Terlaksananya Rakorlitbang dan tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi (Dokumen)</i>				1	150.976.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	<i>Terlaksananya Pelayanan Izin Penelitian (Dokumen)</i>				1	60.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.5.01.5.05.0.00.0 1.00.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						274.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Terlaksananya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)</i>				1	137.000.000,00	(Provinsi Kalimantan Tengah, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						137.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan tugas pokok Bappedalitbang sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah, selalu mempertimbangkan dan mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah serta berbagai sumberdaya dan potensi pembangunan yang ada. Penerapan dan aplikasi di lapangan juga berorientasi pada pemecahan berbagai permasalahan yang aktual dan memperhatikan segenap aspirasi serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tetap mengacu pada berbagai produk perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang relevan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan di daerah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, terutama pada sistem perencanaan pembangunan yang mengedepankan pendekatan melalui 1) **politik**; 2) **teknokratik** 3) **partisipatif**; 4) atas-bawah (**top-down**); dan 5) bawah-atas (**bottom-up**).

Di samping hal-hal tersebut di atas, focusing/penajaman juga dilakukan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (**input**), keluaran (**output**) dan hasil (**result**).

Hal-hal yang perlu menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan rencana kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tupoksi instansi lain adalah kegiatan perencanaan haruslah bersifat makro, artinya suatu perencanaan yang dibuat haruslah berada pada tataran kebijakan nasional/daerah yang menurut sifatnya ada saling ketergantungan dan keterkaitan antar bidang/aspek, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan maupun berbagai pelaku pembangunan dalam merumuskan suatu strategi dan kebijakan dasar pembangunan.

Diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah terjadi konsistensi dan sinkronisasi secara sinergis dan harmonis, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara merata dan adil, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan anggaran dan akuntabilitas.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan juga oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta tergantung juga pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggara dan pelaku pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dan konstruktif dari semua pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah. Diharapkan Bappedalitbang selaku lembaga perencanaan pembangunan di daerah dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.